

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Kashmir merupakan sebuah konflik yang serius antara negara India dan Pakistan dimana dalam menyelesaikan konflik ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan baik di tingkat bilateral ataupun multilateral.¹ India dan Pakistan merupakan dua negara yang selalu memperebutkan mengenai teritori dari wilayah Kashmir, dimana konflik ini tidak pernah selesai.² Bagi suatu negara batas teritorial merupakan sebuah hal yang mutlak, sehingga menyebabkan isu-isu atau permasalahan dalam batas negara merupakan sebuah permasalahan yang sensitif.³ Setelah terjadinya konflik di daerah Kashmir hubungan diplomatik yang terjadi diantara India dan Pakistan semakin tegang, serta pasukan-pasukan dari kedua negara tersebut terlibat saling tembak di wilayah Kashmir.⁴

Secara geografis wilayah Kashmir merupakan sebuah wilayah yang dialiri sungai-sungai besar seperti sungai Indus. Keberadaan dari sungai ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian. Dalam bidang militer wilayah Kashmir ini sendiri berada di daerah pegunungan sehingga dapat menjadi wilayah yang strategis bagi pertahanan suatu negara, dan juga berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Afganistan, China, dan Tibet.⁵ Dengan berbatas

¹ Abdul Majid, "Kashmir: Konflik antara India dan Pakistan," Sebuah Jurnal Penelitian Asia Selatan," Vol. 31, No. 1, (Januari-Juni 2016). 49

² Rizky Alfi, "Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013," JOM FISIP, Vol. 3, No. 2. 3

³ Mutiara Ita Dewi, "Dilema Masalah Kashmir Dalam Kerangka Hubungan India-Pakistan," Mozaik, Vol. 1, No. 1, Juli 2006

⁴ Pipes Daniel, "Hubungan Diplomatik India-Asia Barat," Hindustan Times, 24 Februari 2016. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

⁵ Pribadi Jubaidi: Kashmir dan Timor Timur (Peran PBB), (Jawa Barat: Yayasan Pustaka Grafikasi: 1999), 40.

langsungnya wilayah Kashmir ini dengan Afghanistan, Tajikistan, Tibet dan China, India beranggapan bahwa dengan bergabungnya wilayah Kashmir dengan mereka dapat dijadikan sebuah peluang yang dapat mempengaruhi negara-negara tersebut, hal tersebut dikarenakan wilayah Kashmir ini sendiri merupakan sebuah pintu masuk untuk mempengaruhi negara-negara tersebut.⁶

Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir ini merupakan sebuah konflik yang berkelanjutan, untuk meredam konflik tersebut Negara India memberikan otonomi untuk wilayah Kashmir untuk mengelola wilayah Kashmir itu sendiri pada tahun 1954.⁷ Dalam pemberian hak otonomi ini tidak terlepas dari peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB). PBB mengeluarkan 11 resolusi Dewan Keamanan yang bersangkutan dengan konflik Kashmir ini di tahun 1948.

Separatisme yang terjadi di wilayah Kashmir bukanlah fenomena yang baru, tindakan separatisme ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat Kashmir terhadap Pemerintah India.⁸ Pemberontakan yang terjadi di Kashmir bermula pada tahun 1988 yang dimulai oleh eksklusif muslim. Setelah pemberontakan yang terjadi pada tahun 1988 tersebut banyak bermunculan gerakan-gerakan separatisme di Kashmir seperti *Jamaat el islami*, dan *Kashmir National Liberation Front*.

Pada tahun 2014 Narendra Modi memenangkan pemilu India bersama dengan partai oposisi nasionalis India yaitu *Bharatiya Janata Party (BJP)*,

⁶Alfi Rizky ,”Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013,” JOM FISIP, Vol. 3, No. 2. 4

⁷ Nurul Itsna Rosdiana,” Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu Oleh Pemerintah India,” Jurnal Ilmu Sosial dan Humanira, Vol. 9, No. 2, Oktober 2020. 348

⁸ Reshi Manzoor Ahmad,” Kashmir Insurgency: it’s Changing Trends”, International Journal of Advance Research and Development, Vol. 3, No. 9, 2018.

dimana partai ini mendominasi kursi parlemen dari pemerintahan India, kemenangan ini tidak terlepas dari peran dan kharisma dari Narendra Modi.⁹ Setelah kemenangan tersebut Narendra Modi berjanji akan melakukan pencabutan Artikel 370, dimana artikel ini berisikan hak istimewa bagi masyarakat Kashmir untuk melakukan otonomi dari wilayah mereka sendiri.¹⁰

Setelah terpilihnya Narendra Modi menjadi Perdana Menteri dari Negara India, pada tanggal 5 Agustus 2019 Modi mengumumkan bahwa India akan melakukan pencabutan Artikel 370 yang isinya merupakan sebuah perlindungan untuk masyarakat Kashmir yaitu seperti hak konstitusi dan otonomi.¹¹ Dalam pidatonya Modi mengatakan “*Penghapusan Pasal 370 menandakan dimulainya era baru, status Kashmir telah digunakan sebagai senjata oleh Pakistan untuk menghasut sejumlah orang, namun kini India akan menyingkirkan terorisme dan para teroris dari daerah itu*”.¹² Pernyataan lain dari Pemerintah India tentang pencabutan artikel 370 ini adalah “*Sebuah era baru telah dimulai di Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Pasal 370 merupakan rintangan bagi perkembangan Kashmir. Hak semua penduduk India adalah sama, dan tanggung jawab mereka juga sama. Kerugian yang dilakukan Pasal 370 terhadap orang-orang Jammu dan Kashmir dan Ladakh tidak pernah dibahas. Pasal 370 dan Pasal 35A hanya memberikan separatisme, nepotisme, dan korupsi kepada orang-orang Jammu*

⁹ The National Institute for Defence Studies, “Chapter 5 India: The Foreign and Security Policy under Modi Government,” dalam *East Asia Strategic Review 2015*, (Tokyo: The Japan Time, Ltd, 2015): 171.

¹⁰ Kurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema, “Modi’s Kashmir Policy: The Probable Consequence for the Security of South Asia,” *Strategic Studies*, Vol. 37 No. 3, (2017): 3.

¹¹ Bilal Kuchay, “India Revokes Kashmir’s Special Status,” 4 September 2019, Al-Jazeera, diakses pada tanggal 5 Desember 2021, melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/4/india-revokes-kashmirs-special-status>.

¹² BBC News, “PM India Membela Keputusannya Mencabut Status Khusus Kashmir,” 9 Agustus 2019, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4659005/pm-india-membela-keputusannya-mencabut-status-khusus-kashmir>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

dan Kashmir".¹³ Kebijakan dari Pemerintah India untuk melakukan pencabutan Artikel 370 ini sendiri resmi disahkan pada tanggal 31 Oktober 2019.¹⁴ Dengan adanya pencabutan Artikel 370 ini berakibat penolakan dari masyarakat Kashmir sendiri, dimana dengan adanya pencabutan ini bisa jadi memungkinkan pihak *unionist* bergabung dengan kelompok separatis yang ada di wilayah Kashmir itu sendiri.¹⁵ Masyarakat Kashmir juga melakukan demo dan memunculkan slogan yang berarti "apa yang kami inginkan adalah kemerdekaan".¹⁶

Pemerintah India banyak melakukan pelanggaran HAM di wilayah Kashmir, seperti pemerintah Negara India melakukan penangkapan masyarakat Kashmir tanpa ada tuduhan.¹⁷ Pemerintah India juga melakukan pencabutan Artikel 370 tentang status hak istimewa bagi wilayah Kashmir, serta Pemerintah India juga melakukan tindakan peningkatan keamanan serta melakukan tindakan pemutusan jaringan telekomunikasi dan internet sehingga mengakibatkan gerak dari masyarakat di wilayah Kashmir menjadi terbatas.¹⁸ Sheikh Ashiq Ahmed selaku Presiden KCCI (*Kashmir Chamber of Commerce and Industries*) atau Kamar Dagang dan Industri Kashmir mengungkapkan " Dalam 120 hari terakhir kami telah melihat bagaimana setiap sektor telah berdarah-darah. Kami khawatir krisis

¹³ Business Today.in, " Article 370, Kashmir Issue: Key Quotes From PM Modi's address to the Nation" 9 Agustus 2019 , <https://www.businesstoday.in/latest/economy-politics/story/narendra-modi-address-nation-article-370-future-jk-10-major-points-219262-2019-08-09>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

¹⁴ Hasan A.R, "India Resmi Membelah dan Menurunkan Status Jammu-Kashmir," 8 November 2019 Retrieved, diakses melalui https://www.liputan6.com/global/read/4099_996/india-resmi-membelah-dan-menurunkan-status-jammu-kashmir, diakses pada tanggal 1 Februari 2022

¹⁵ Rather, Tariq Ahmad, dkk. "Abrogation of Article 370 of the Constitution of India: Socio-Economic and Political Implications in Jammu and Kashmir." *IJRAR* Vol. 7, Issue. 3. 512-515

¹⁶ Sultan Ahmed Ali, "Demographic Changes: A Challenge to the Decolonization of Kashmir," *International Journal of Social Sciences*, Vol. 6, Issue 1, (2020). 411

¹⁷ Joko Sadewo, "Infografis Desakan Hentikan Pelanggaran HAM di Kashmir", *Republika.Co.ID*, Maret, 26, 2020.

¹⁸ Rizky Jaramaya, " Ekonomi Kashmir Turun Drastis Sejak Akses Dibatasi", *Republika*, Desember, 18, 2019.

ini akan semakin meningkat pada 2020”.¹⁹ Adanya tindakan dari Pemerintah India ini berakibat terhadap turunnya tingkat perekonomian di wilayah Kashmir. Akibat dari pencabutan Artikel 370 ini wilayah Kashmir mengalami kerugian ekonomi sebesar kurang lebih US\$ 2,4 miliar.²⁰ Dari serangkaian penjabaran di atas tentang pencabutan otonomi Kashmir oleh Pemerintah India. Penjelasan tentang perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Kashmir sendiri, serta penindasan yang dialami masyarakat Kashmir. Penulis tertarik untuk meneliti sekuritisasi isu separatisme oleh India sebagai justifikasi pencabutan otonomi Kashmir.

1.2 Rumusan Masalah

Kashmir merupakan wilayah yang dipersengketakan oleh India dan Pakistan dari tahun 1947. Setelah perang tahun 1971 disepakati *Line of Control* (LOC), dimana India menguasai bagian timur dan selatan dari Kashmir (Jammu, Ladakh, dan Lembah Kashmir). Wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India diberi hak otonomi khusus yakni artikel 370, yang berisikan pemberian hak terhadap Kashmir untuk dalam membuat hukum sendiri kecuali dalam bidang pertahanan, komunikasi, dan luar negeri. Pada tahun 2019 Pemerintah India melakukan pencabutan terhadap Artikel 370, dengan alasan bahwa negara India akan melakukan era baru serta ingin menghapuskan separatisme dari wilayah tersebut. Pemerintah India sendiri banyak melakukan pelanggaran di wilayah Kashmir seperti melakukan penangkapan terhadap masyarakat Kashmir tanpa ada tuduhan,

¹⁹ Rizky Jaramaya.

²⁰ Rizky Jaramaya, “Ekonomi Kashmir Turun Drastis Sejak Akses Dibatasi,” *Republika.co.id*, 18 Desember 2019, <https://internasional.republika.co.id/berita/q2pe6y366/ekonomi-kashmir-turun-drastis-sejak-akses-dibatasi>, diakses pada 3 Desember 2021.

serta melakukan peningkatan keamanan di wilayah Kashmir. Dari serangkaian penjelasan diatas diindikasikan bahwa Pemerintah India berupaya untuk melakukan sekuritisasi terkait separatisme dengan melakukan pencabutan terhadap otonomi Kashmir.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab yaitu, bagaimana sekuritisasi isu separatisme sebagai justifikasi yang melatarbelakangi pencabutan otonomi Kashmir oleh Negara India ?

1.4 Tujuan Penelitian

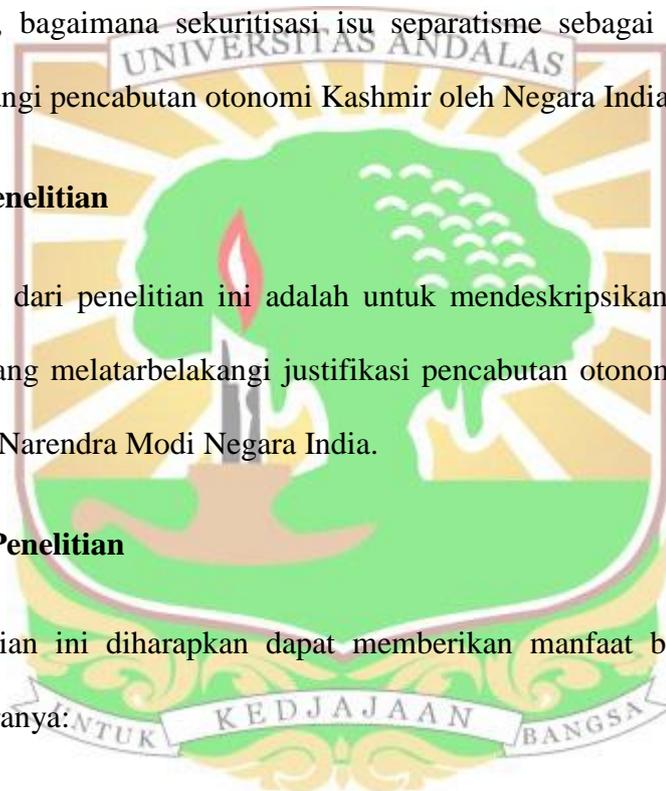
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sekuritisasi isu separatisme yang melatarbelakangi justifikasi pencabutan otonomi Kashmir oleh Pemerintahan Narendra Modi Negara India.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Dari sisi akademis penelitian ini akan menambah kajian tentang sekuritisasi terkait isu terorisme dan separatisme pada studi Hubungan Internasional.
2. Dari sisi praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait analisis proses dan pelaksanaan sekuritisasi di suatu negara.

1.6 Tinjauan Pustaka



Pada penelitian ini menggunakan beberapa rujukan penelitian terdahulu untuk menemukan *gap* penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diangkat. Pertama, penelitian yang berjudul “*Modi’s Kashmir Policy: The Probable Consequence for the Security of South Asia*” oleh Khurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema yang dimuat pada *Strategic Studies* Volume 37 Nomor 3 Tahun 2017. Dalam penelitian tersebut membahas kebijakan Perdana Menteri India Narendra Modi yang menduduki Kashmir sehingga menimbulkan ketegangan antara India dengan Pakistan. Oleh karena itu, India dan masyarakat internasional harus menyadari bahwa tidak satu pun dari strategi selain “dialog” yang melibatkan semua pemangku kepentingan akan berhasil menyelesaikan masalah yang telah lama tertunda termasuk masalah inti Jammu dan Kashmir.²¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada penelitian ini membahas tentang konflik India dan Pakistan di Kashmir di mana dialog menjadi strategi untuk resolusi konflik, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang cara India membingkai isu separatisme yang kemudian otonomi khusus Kashmir dicabut.

Penelitian kedua berjudul “*Use of Rape as Weapon against Women by Indian Forces in Occupied Kashmir: A Securitization Perspective*” oleh Muhammad Usman Askari dan Mahboob Alam yang terdapat pada *Journal of Politics and International Studies* Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021. Artikel ini didasarkan pada argumen bahwa pasukan India menggunakan pemerkosaan sebagai senjata terhadap perempuan di wilayah sengketa Kashmir untuk menghilangkan perjuangan kebebasan penduduk Muslim. Kekuatan pemicu di

²¹ Khurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema “*Modi’s Kashmir Policy: The Probable Consequence for the Security of South Asia*”, *Strategic Studies*, Vol. 37, No. 3, 2017.

balik taktik pelecehan seksual ini adalah ideologi *Hindutva*. Di bawah ideologi ini, rezim India mencoba mengubah status sekuler India menjadi Negara Hindu. Pemerintah Modi mendukung kekerasan komunal terhadap minoritas untuk tujuan politiknya. Praktik seksual yang berkembang seperti itu berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental perempuan. Kebijakan seperti itu hanya merusak tatanan sosial komunitas Kashmir tetapi juga akan mengganggu perdamaian seluruh Asia Selatan.²² Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah, pada penelitian ini membahas bagaimana India menggunakan cara-cara kekerasan seksual untuk meredam perlawanan rakyat Kashmir terhadap India dan ini salah satu bentuk cara India melakukan sekuritisasi di Kashmir. Pada penelitian yang akan penulis teliti adalah berfokus kepada isu separatisme sebagai bentuk sekuritisasi India terhadap Kashmir.

Kemudian penelitian selanjutnya yaitu "*Identity Politics in Kashmir Conflict: Role of Hindu Nationalism*" yang ditulis oleh Abdul Wasay Ajmal, dimuat pada *Foresight Global Challenges and Strategies* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021. Artikel ini membahas politik identitas telah mempengaruhi dan membentuk konflik Kashmir dan wacana politik dalam konteks yang lebih besar dari hubungan India-Pakistan. Nasionalisme Hindu telah menyebabkan krisis identitas di lembah Kashmir. Artikel ini menggunakan teori sekuritisasi yang menyatakan politik identitas nasionalisme Hindu dalam menghasilkan krisis identitas dan konflik di Kashmir penting dalam konteks keamanan regional yang lebih besar di Asia Selatan, pada apa yang sudah dianggap sebagai "awal konflik

²² Muhammad Usman Askari dan Mahboob Alam "*Use of Rape as Weapon against Women by Indian Forces in Occupied Kashmir: A Securitization Perspective*", *Journal of Politics and International Studies*, Vol. 7, No. 2, 2021.

nuklir” antara India dan Pakistan.²³ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah, pada penelitian ini membahas politik identitas Nasionalisme Hindu yang digunakan India sebagai bagian sekuritasasinya di Kashmir yang menimbulkan konflik. Pada penelitian yang akan diteliti membahas tentang isu separatisme yang digunakan India dalam konflik Kashmir sebagai bagian sekuritasasinya.

Keempat, artikel berjudul “Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu oleh Pemerintah India”, oleh Nurul Itsna Rosdiana pada Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume 9 Nomor 20 Tahun 2020. Artikel ini menegaskan bahwa alasan India mencabut Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu adalah keinginan India untuk menggabungkan secara menyeluruh ke dalam Uni India yang mana ini juga sebagai bentuk cara India memperlihatkan *power* nya terhadap Pakistan. Kemudian Kashmir yang letak geografisnya strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan memiliki nilai pariwisata yang tinggi, hal tersebut menjadi kepentingan ekonomi India untuk menegaskan posisinya terhadap Kashmir untuk memperoleh keuntungan di dalamnya.²⁴ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah, pada penelitian ini membahas tentang tujuan India mencabut Otonomi Khusus terhadap Kashmir, dimana hal ini berbeda dengan tujuan penelitian yang diangkat oleh penulis.

²³ Abdul Wasay Ajmal “*Identity Politics in Kashmir Conflict: Role of Hindu Nationalism*”, *Foresight Global Challenges and Strategies*, Vol. 1, No. 1, 2021.

²⁴ Nurul Itsna Rosdiana “Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu oleh Pemerintah India”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 20, 2020.

Terakhir, yaitu “Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019” yang ditulis oleh Demita Ayuwanda Mukti dan Anggun Puspitasari, serta dimuat dalam Budi Luhur Journal of Contemporary Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan konflik Kashmir antara India dan Pakistan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Asia Selatan dengan meningkatnya intensitas terorisme lintas batas, pengembangan senjata nuklir dan perlombaan senjata, dan negara-negara di Kawasan Asia Selatan tumbuh dengan ketidakpercayaan satu sama lain.²⁵ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat adalah, pada penelitian ini membahas tentang dampak dari konflik India-Pakistan dalam konflik Kashmir terhadap kawasan Asia Selatan. Pada penelitian yang diangkat membahas tentang isu separatisme dalam mencabut otonomi Kashmir yang dilihat dari sekuritisasi yang India lakukan.

Tabel 1.6 Perbedaan antara Studi Pustaka dengan Penelitian

NO	JUDUL	PENULIS	PERBEDAAN
1	Modi's Kashmir Policy: The Probable Consequence for the Security of South Asia	Khurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema	Pada penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi antara India dengan Pakistan di wilayah Kashmir serta dialog menjadi salah satu cara untuk resolusi konflik yang terjadi, pada penelitian yang akan diangkat membahas cara India meringkai isu separatisme yang mengakibatkan pencabutan terhadap otonomi khusus Kashmir yaitu artikel

²⁵ Demita Ayuwanda Mukti dan Anggun Puspitasari “Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019”, Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy, Vol. 4, NO. 2, 2020

			370.
2	Use of Rape as Weapon against Women by Indian Forces in Occupied Kashmir: A Securitization Perspective	Muhammad Usman Askari dan Mahboob Alam	Pada penelitian ini membahas tentang India yang menggunakan cara-cara kekerasan seksual untuk meredam perlawanan dari rakyat Kashmir terhadap India serta ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh India dalam melakukan sekuritisasi di Kashmir. Pada penelitian yang akan diangkat tentunya sudah berbeda dengan penelitian ini, penelitian yang diangkat sendiri akan berfokus terhadap isu separatisme sebagai bentuk sekuritisasi yang dilakukan India terhadap Kashmir.
3	Identity Politics in Kashmir Conflict: Role of Hindu Nationalism”, Foresight Global Challenges and Strategies	Abdul Wasay Ajmal	Pada penelitian ini membahas tentang identitas dari Nasionalisme Hindu yang digunakan oleh India sebagai bagian dari sekuritisasinya di Kashmir serta menimbulkan konflik. Pada penelitian yang akan diangkat akan membahas isu separatisme yang digunakan oleh India dalam konflik Kashmir sebagai bagian dari sekuritisasinya.
4	Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu oleh Pemerintah India	Nurul Itsna Rosdiana	Pada penelitian ini membahas tentang tujuan dari India dalam mencabut otonomi khusus Kashmir. Pada penelitian yang akan diangkat adalah isu separatisme yang terjadi di Kashmir menjadi latar belakang India dalam melakukan pencabutan otonomi Kashmir.
5	Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019	Demita Ayuwanda Mukti dan Anggun Puspitasari	Pada penelitian ini membahas tentang dampak konflik India-Pakistan dalam konflik Kashmir terhadap kawasan Asia Selatan. Pada penelitian yang akan diangkat membahas tentang isu separatisme dalam

			melakukan pencabutan otonomi Kashmir yang dilihat dari sekuritisasi yang dilakukan oleh India.
--	--	--	--

Sumber : Diolah oleh Penulis

Dengan demikian, adanya perbedaan-perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka penelitian ini mengisi dari *gap* penelitian-penelitian terdahulu tersebut untuk memberikan kebaruan dalam penelitian mengenai konflik Kashmir, khususnya mengenai separatisme sebagai isu yang digunakan oleh India untuk menarik otonomi Kashmir melalui sekuritisasi.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.1.1 Sekuritisasi

Dalam menganalisis dan juga menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep sekuritisasi. Konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Copenhagen School, yakni Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde. Konsep ini sendiri dikemukakan dalam buku yang berjudul: *A New Frame Work of Analysis*. Para ahli tersebut mengemukakan dalam buku tersebut para ahli tersebut mengatakan bahwa sekuritisasi keamanan tersebut merupakan sebuah langkah yang diambil menggunakan aturan main sebuah isu yang di bingkai.

Para ahli yang juga mengemukakan tentang konsep sekuritisasi adalah Copenhagen School, yang menjelaskan ada dua tahapan dalam sebuah proses sekuritisasi terhadap isu yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi yaitu:²⁶

²⁶ Rita Floyd, *Security and The Environment: Securitisation Theory abd the U.S Environment Security Policy*, (London: Cambridge University: 2010)

1. Tahap Pemunculan Isu

Adalah sebuah proses langkah awal yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam menggambarkan munculnya sebuah isu tertentu yang nantinya akan disekuritisasi. Aktor sekuritisasi sendiri akan berupaya memunculkan isu tersebut agar menjadi perhatian *audience*. Pada langkah pertama para aktor sekuriti akan menggambarkan isu-isu yang dianggap sebagai ancaman dan akan membahayakan *referent object*.²⁷ Setelah terlaksananya langkah pertama, maka isu tersebut akan ditetapkan sebagai isu yang dapat mengancam keamanan nasional ataupun internasional, karena isu tersebut dianggap lebih penting daripada isu lainnya.

2. Tahap Meyakinkan Audience

Pada tahap ini akan menunjukkan keberhasilan dari sebuah sekuritisasi tergantung kepada audience (opini publik, aparat militer, politisi, atau elit politik lainnya) yang diyakinkan oleh aktor sekuritisasi itu sendiri untuk melegitimasi suatu isu menjadi ancaman eksistensial serta membahayakan *referent object*. Sekuritisasi sendiri merupakan sebuah hasil dari keputusan politik. Sekuritisasi sendiri dianggap sukses apabila munculnya anggapan dan pengakuan bahwa kebijakan politik yang normal selama ini tidak mampu untuk mengatasi isu yang dianggap mengancam.²⁸

²⁷ Open Edition Books. Securitization theory according to the Copenhagen School. Diakses dari <http://books.openedition.org/iheid/719> (diakses pada 22 Juni 2022)

²⁸ Emmers R. "Securitization". Dalam Contemporary Security Studies, ed. Allan Collins, Hal. 111-115. Oxford University Press. New York. (2007): 340

Secara singkatnya isu keamanan merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan melakukan pertahanan, sedangkan sekuritisasi adalah sebuah upaya politik yang dilakukan secara ekstrim.²⁹ Arti lain dari sekuritisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses yang memiliki tujuan untuk mengkontruksi suatu isu yang terjadi serta isu tersebut memiliki nilai keamanan agar isu tersebut menjadi sebuah perhatian.³⁰ Sekuritisasi terjadi apabila aktor yang bersangkutan menggunakan sebuah narasi bahwa isu yang terjadi diluar politik normal, sehingga secara singkatnya sekuritisasi terjadi dikarenakan adanya *exixtential thereat* dan memiliki dampak terhadap politik.³¹

Secara umum isu publik sendiri dibagi menjadi tiga kategori:³²

1. *Nonpoliticized* maksudnya adalah suatu isu politik yang terjadi tidak menjadi bahan perdebatan dari publik, dan juga isu yang terjadi tidak berkaitan dengan kepentingan dari banyak orang, yang membuat pemerintah tidak berhak dan juga tidak memiliki wewenang dalam menangani isu tersebut.
2. *Politicized*, artinya adalah suatu isu yang terjadi menyangkut dengan kepentingan publik. Akibat dari adanya kepentingan publik dalam isu tersebut dibutuhkan adanya intervensi dari pemerintah dalam menyelesaikan isu yang terjadi.

²⁹ Barry Buzan, Ole Waver, & Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner (1998): 23

³⁰ Peter Hough, et al., *International Security Studies: Theory and Practice*, (New York:Routledge, 2015): 81

³¹ Mega Nisfa Makhroja, "Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa", *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, Vol. 2 No. 1 (January - June 2020), 7

³² Barry Buzan, et al., 22-23

3. *To securitized*, artinya adalah sebuah isu yang terjadi dianggap sebagai ancaman keamanan, dan juga membahayakan bagi publik. Isu yang berbahaya bagi publik itu sendiri membuat dibutuhkan sebuah tindakan yang darurat untuk mengatasinya.

Sebuah isu yang berubah menjadi sebuah isu keamanan bukan hanya disebabkan oleh isu tersebut benar-benar mengancam, akan tetapi lebih disebabkan oleh dimunculkannya isu tersebut sebagai isu yang mengancam.³³ Praktik ini kemudian yang dapat memunculkan suatu isu menjadi sebuah isu keamanan. Proses perubahan yang terjadi bukan karena disebabkan oleh adanya ancaman yang nyata dari isu tersebut, akan tetapi lebih cenderung disebabkan dengan adanya penekanan masalah yang kemudian isu tersebut menjadi sebuah ancaman.³⁴

Dalam melakukan analisa terhadap sebuah isu keamanan dengan pendekatan tindakan dari sang aktor dalam melakukan tindakan sekuritisasi (*speech act*), menurut Buzan, Weaver, Jaap de Wilde diperlukan lima unit yang berhubungan. Yaitu :

1. *Referent objects*, adalah sesuatu yang dilihat terancam secara nyata dan memiliki tuntutan resmi untuk bertahan. Dalam pandangan tradisional *referent object* ini adalah negara ataupun bangsa. Bagi suatu negara kedaulatan adalah sebuah *referent object*, sedangkan bagi bangsa adalah identitas.³⁵ *referent object* bukan hanya sebatas negara dan

³³ Barry Buzan, et al., 24-25.

³⁴ Barry Buzan, et al., 23-34.

³⁵ Waever 1988 dan 1995, dikutip dalam Barry buzan, Ole Waever, and Jaap De Wilde, *Security a New Framework for Analysis*. (Colorado, USA: Lynne Rienner Publisher, Inc, 1998), 36

bangsa saja, akan tetapi ada beberapa spektrum yang berpotensi menjadi *referent object*.³⁶ Setiap aktor akan melakukan segala cara dalam meyakinkan publik terhadap sebuah *referent object*. Kemampuan dari setiap aktor dalam mengemas sebuah isu yang bersangkutan menjadi suatu penyebab berhasil atau gagalnya perubahan suatu isu menjadi isu keamanan.

2. *Securitizing actors*, adalah seseorang ataupun kelompok individu yang melakukan sebuah tindakan *speech-act* yang bertujuan untuk menjadikan sebuah isu menjadi isu keamanan.³⁷ *Securitizing actor* sendiri akan melakukan sebuah penyampaian berbagai bentuk ancaman ekstensial jika suatu isu keamanan tidak diperhatikan secara cepat. Aktor dari *securitizing actor* ini sendiri umumnya berasal dari Pemerintah, Birokrat, Pimpinan Politik.
3. *Existential Threat*, adalah sebuah bentuk-bentuk ancaman yang muncul dari isu yang mengancam keamanan nasional sebuah Negara. Hal inilah yang nantinya akan menjadi dasar dari *securitizing actor* dalam melakukan sebuah tindakan sekuritisasi keamanan.
4. *Functional actors*, adalah aktor yang dapat memberikan efek terhadap dinamika para pembuat kebijakan keamanan, serta menentukan perkembangan proses sebuah sekuritisasi sebuah isu tanpa harus menjadi bagian dari *securitizing actor* atau *referent object*.³⁸

³⁶ Waever 1988 dan 1995, 36.

³⁷ Waever 1988 dan 1995, 36.

³⁸ Buzan et al., 36.

5. *Audience*, adalah pihak-pihak yang menjadi target oleh aktor sekuritisasi dan juga pihak yang memberikan persetujuan dalam tindakan sekuritisasi.

Dalam analisis penelitian ini, akan dilakukan dengan menggabungkan konsep yang dikemukakan oleh Buzan, Ole Weaver, Jaap de Wilde dengan konsep Copenhagen School.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelajahi dan memahami anggapan dari individu atau kelompok masyarakat serta mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu sosial dan kemanusiaan.³⁹ Alasan penulis menggunakan pendekatan ini dikarenakan penulis ingin memperoleh pengetahuan yang dalam mengenai bagaimana isu separatisme disekuritisasi menjadi justifikasi pencabutan otonomi dari wilayah Kashmir. Penulis juga menggunakan penelitian deskriptif dalam membantu penulis untuk menggambarkan suatu fenomena, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat ini berdasarkan fakta dan data di lapangan.⁴⁰ Penulis juga menggambarkan bagaimana isu separatisme disekuritisasi sebagai justifikasi pencabutan otonomi dari wilayah Kashmir.

³⁹ Bakry, Umar Suryadi, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar): 60-74

⁴⁰ Hadari Nawawi, H. Murni Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. 2, 1996): 73

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian berdasarkan rentang waktu dan batas wilayah penelitian, untuk rentang waktu penulis membatasi dari masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dari tahun 2014-2019. Proses pencabutan otonomi Kashmir sendiri dilakukan semenjak Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri dari Negara India. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti juga menggunakan data di luar batas penelitian yang bertujuan untuk memperkuat argumentasi penelitian ini. Peneliti sendiri mendapati bahwa penelitian ini dibatasi sebelum menjabatnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri Negara India, yaitu sejak awal terjadinya konflik di wilayah Kashmir itu sendiri. Sedangkan untuk wilayah penelitian, peneliti membatasi sesuai dengan negara yang peneliti batasi yaitu India dan Pakistan.

1.8.3 Unit Analisis, Unit Eksplanasi, dan Tingkat Analisis

Level dan unit analisis merupakan hal yang sangat penting dalam melihat fokus penelitian dalam studi hubungan internasional. Unit analisis sendiri merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis, sedangkan unit ekplanasi adalah merupakan unit yang menjadi penjelas dari unit analisis.⁴¹ Unit analisis dalam penelitian ini adalah sekuritisasi isu separatisme oleh Pemerintah India, sedangkan unit eksplanasi adalah pencabutan otonomi khusus Kashmir. Sedangkan tingkat analisis pada penelitian ini adalah Negara India

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

⁴¹ Hadari Nawawi, H. Murni Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. 2, 1996): 73

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dalam mencari informasi dan data yaitu melalui buku, artikel jurnal, publikasi, dokumen pemerintah India, dan sumber berita dari internet. Adapun pengumpulan data dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisa tulisan-tulisan serta literatur yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun sumber-sumber tersebut didapatkan melalui jurnal nasional maupun internasional terkait isu Kashmir, kebijakan India terhadap Kashmir, terutama mengenai pencabutan otonomi Kashmir serta artikel-artikel jurnal yang dipublikasikan oleh *South Asian Studies*, *South Asia Research* oleh SAGE Journals. Data-data juga diperoleh melalui situs-situs resmi Pemerintah India berupa teks pidato maupun pernyataan dari Pemerintah India. Kata kunci yang penulis gunakan dalam mencari sumber data dan informasi adalah Kashmir, Separatisme Kashmir, *Article 370 abrogation*.

1.8.5 Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan berfokus pada analisa bagaimana isu terorisme dan separatisme sebagai justifikasi pencabutan otonomi Kashmir. Dari data-data yang didapatkan, peneliti akan melakukan analisis melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti akan menganalisis lima indikator atau unit yang terdapat dalam proses sekuritisasi, seperti aktor sekuritisasi (*securitizing actor*), pernyataan/pidato (*speech act*), ancaman eksistensial (*existential threat*), obyek referensi (*referent object*), pendengar (*audience*), dan aktor fungsional (*functional actor*). Kedua, peneliti akan menganalisis tahapan sekuritisasi berdasarkan konsep Sekuritisasi (*securitization*) yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Di mana tahapan itu terdiri atas tahap pemunculan isu dan tahap

meyakinkan audience. Tahap-tahapan tersebut akan menunjukkan bagaimana isu separatisme disekuritisasi sebagai justifikasi pencabutan otonomi Kashmir yang membedakan kebijakan-kebijakan pencabutan otonomi Kashmir berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penyusunan penelitian ini dan dapat dijadikan referensi yang baik, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan berisi alasan peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap bagaimana isu separatisme disekuritisasi sebagai justifikasi pencabutan otonomi Kashmir. Bab ini sendiri mencakup latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II OTONOMI KHUSUS KASHMIR DI BAWAH INDIA

Bab ini berisikan bagaimana perlakuan Pemerintah India dan Negara India terhadap wilayah Kashmir dari masa ke masa, serta berisikan bagaimana sejarah terbentuknya Artikel 370, serta berisikan bagaimana isu separatisme muncul di Kashmir.

BAB III RESPON PEMERINTAH INDIA TERHADAP ISU SEPARATISME KASHMIR

Bab ini berisikan bagaimana respon yang dilakukan oleh Pemerintah India dalam menanggapi permasalahan separatisme di Kashmir. Bab ini juga berisikan perlawanan masyarakat Kashmir terhadap Pemerintah India, pencabutan Artikel 370.

BAB IV SEKURITISASI ISU SEPARATISME OLEH INDIA SEBAGAI JUSTIFIKASI PENCABUTAN OTONOMI KASHMIR

Pada bab ini penulis akan menggunakan konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde serta konsep yang dikemukakan oleh Copenhagen School dalam menganalisa bagaimana isu separatisme yang terjadi di Kashmir menjadi justifikasi pencabutan otonomi Kashmir oleh India.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan membahas ringkasan dari pembahasan serta kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini terhadap topik penelitian yang diteliti

